

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bintaro, R 1983,interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Djohermansyah Djohan, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat ditingkat Lokal, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga.
- HAW Widjaja, 1993, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafiie, 2013, Ilmu Pemerintahan, Semarang, Bumi Aksara.
- Iswan Kaputra, Amrin Banjarnahor, Armasyah Matondang, dkk, 2013, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- J. Kaloh, 2003, Kepala Daerah Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Keuangan, 2017, *Buku Pintar Dan Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, hlm. 23
- Mahfud MD, 2003, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Press

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016  
Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara  
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana  
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana  
Desa Tahun 2017;

## **Jurnal**

- Afriniko, 2015, “ Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 2 No 2
- Arifudin Mas’ud, Safarudin, dan Faiziah, 2017, “Persepsi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 No 2
- Edy Supriadi, 2015, “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Ius*, Vol 3 No 2
- Indah, 2014, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9 No2
- Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, 2010, “Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No 6
- Moh Amad Safri, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita, 2017, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintahan Desa di Kabupaten Buol”, *Jurnal Katalogis*, Vol 5 No 9
- Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13 No 2
- Ombi Romli, 2017, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No 1
- Sakinah Nadir, 2013, “ Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa ” *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1 No 1
- Yusnani Hasjimzoem, 2014, “ Dinamika Hukum Pemerintahan Desa” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 3